MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENYUSUN VISI SEKOLAH MELALUI BIMBINGAN INTENSIF PADA SMP NEGERI 10 SUNGAI KAKAP

**Oleh : Lili Ng Chui Mi¹
Pengawas Sekolah Kab. Kubu Raya**

Abstract: This study departs from the principal background in formulating the school's vision not incorporate elements of skill, because there is a deep understanding of the formulation of the school's vision. this can be known when researcher holds managerial supervision by looking at the KTSP documents made, where in chapter II contains the vision of the school.

This study aims to improve the ability of principals in formulating the school's vision. The research method used is a form of qualitative descriptive approach. Datas were collected through interviews, observation, and discussion. The implementation procedure consisted of stages: (1) planning, (2) implementation, (3) observation, and (4) reflection.

The results showed that through intensive counseling can improve the ability of principals in formulating the school's vision, this can be evidenced from the observation from cycle 1 to cycle 2. Before the guidance, the school's vision reads: "faithful and devoted, Achievement and Noble". After the guidance, the vision formulation showed an increase with the addition of skilled phrase is "faithful and devoted, Achievement, Skilled and noble."

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Visi Sekolah dan Bimbingan Intensif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan amanat GBHN 1999-2004 Tap MPR No.IV/MPR/1999 Bab IV-E yang isinya dalam bidang pendidikan menyatakan perlu melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan

¹ Lili Ng Chui Mi adalah Pengawas Sekolah Kabupaten Kubu Raya

kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

Lebih lanjut lagi sesuai dengan amanat GBHN Tahun 1999-2004 pemerintah telah menyempurnakan kurikulum 1984, 1994, 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013. Pengembangan dan perubahan kurikulum dan komponen pendidikan lainnya merupakan hal yang wajar terjadi, karena pendidikan merupakan satu wujud kebudayaan manusia tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan terus menerus dan sistematis, menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan Ilmu dan Teknologi serta untuk menjawab tantangan masa depan.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Implimentasi Undang-Undang Dasar Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Untuk memenuhi amanat peraturan perundangan dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada khususnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah pada masa sekarang dan yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui Kurikulum yang disusun, sekolah dapat melaksanakan program pendidikannya sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (BSNP, 2006:8). Pengembangan Kurikulum sekolah bertujuan untuk (1) sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran; (2) Masterplan dalam mengembangkan budaya dan potensi yang ada di lingkungan sekolah; dan (3) sebagai pedoman penentuan kebijakan sekolah.

Salah satu bab dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yaitu bab II yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan. Dengan disusun visi maka dapat diketahui pandangan jauh ke depan ke mana sekolah akan di bawa atau gambaran masa depan yang diinginkan sekolah agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Visi sekolah yang dibuat harus tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yaitu tujuan pendidikan nasional.

Landasan yuridis yang harus diperhatikan dalam penyusunan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan adalah UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, Permendikbud No.54, 64, 65, 66 dan 81a Tahun 2013.

Berdasarkan peraturan perundangan, Peraturan Pemerintah dan Permendikbud tersebut di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan nasional, sekolah sebagai lembaga pendidikan memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan kurikulum 2013 yaitu pada bab II yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. Dalam perumusan visi sekolah harus memasukan Sikap (K1, K2), pengetahuan (K3) dan keterampilan (K4), hal ini sesuai dengan tuntutan permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Buku Manajemen Implementasi

Kurikulum 2013 yaitu tentang Bahan Ajar Implementasi Kurikulum Untuk pengawas Sekolah (Kemendikbud, 2014).

Masalah yang terjadi di lapangan masih ditemukan kepala sekolah dalam menyusun visi sekolah belum sesuai dengan tuntutan perumusan visi sekolah. Hal ini dapat diketahui pada saat peneliti melakukan supervisi manajerial yaitu dengan melihat visi sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah. Pada umumnya Visi sekolah yang dibuat sudah memasukan unsur sikap (K1, K2) dan pengetahuan (K3), namun unsur keterampilan (K4) belum dimasukan . Berikut ini dapat dilihat perumusan visi sekolah sebagai berikut: “ Beriman dan Bertakwa, Berprestasi dan Berakhlak Mulia”.

Berdasarkan perumusan visi tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perumusan visi belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan perumusan visi sekolah. Oleh karena itu peneliti sebagai pembina sekolah berusaha untuk memberikan bimbingan intensif pada kepala sekolah dalam menyusun visi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Tupoksi peneliti sebagai pengawas sekolah yang terdapat pada Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang enam standar kompetensi pengawas sekolah, salah satunya supervisi manajerial menyatakan “ membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah”.

Kurikulum 2013 mulai diimplementasikan tahun 2013/2014 pada sejumlah sekolah sasaran. Dalam rangka implementasi selanjutnya semua kegiatan sekolah harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013 tersebut. Salah satu kegiatan dalam pengelolaan sekolah adalah penyusunan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.

Berdasarkan Kemendikbud (2014:4) Visi adalah “ wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah yang digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah” . Dengan kata lain visi adalah pandangan jauh ke depan kemana sekolah akan di bawa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Lebih lanjut Kemendikbud (2014:5) menyatakan syarat perumusan visi yakni: (1) Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan; (2) Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik; (3) Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan; (4) Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang; (5) Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik; (6) Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.

Berikut Kemendikbud (2014:5) menyatakan:

Perumusan visi satuan organisasi dilakukan prosedur dan tahapan sebagai berikut yakni: (1) Mengkaji makna visi satuan organisasi diatasnya untuk digunakan sebagai acuan; (2) Menginventarisasi rumusan tugas satuan organisasi yang tercantum dalam struktur dan tata kerja satuan organisasi yang bersangkutan; (3) Rumusan tugas satuan organisasi tersebut di rangkum dan dirumuskan kembali menjadi konsep rumusan visi satuan organisasi; (4) Konsep rumusan visi satuan organisasi didiskusikan dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi dan saran-saran; (5) Rumusan visi satuan organisasi dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder guna memperoleh penyempurnaan; (6) Rumusan visi satuan organisasi yang telah menjadi kesepakatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan satuan organisasi, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen seluruh anggota organisasi.

Rumusan visi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut: (1) Rumusannya singkat, padat dan mudah diingat; (2) Bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya; (3) Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang yang membawa eksistensi/ keberadaan suatu organisasi; (4) Menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait (stakeholders); (5) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (6) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam suatu organisasi; (7) Memiliki orientasi terhadap masa depan , sehingga segenap jajaran organisasi ikut berperan dalam pencapaiannya; (8) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi; (9) Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan datang; (10) Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan/perubahan tugas dan fungsi.

Kemendikbud (2014:5) menyatakan: “Teknik perumusan visi satuan organisasi dirumuskan dengan cara sebagai berikut: Mereview (meninjau kembali) masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats (SWOT), dengan cara menganalisis konteks tentang kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh sekolah. serta melihat peluang dan ancaman yang terjadi di sekeliling sekolah”.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan seluruh anggota satuan organisasi dan satuan kerja untuk memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal sesuai dengan kemampuannya.
- b. Menumbuhkan sikap rasa memiliki (melu handarbeni atau sense of belongingess) mengenai visi yang akan dirumuskan bersama.
- c. Mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota satuan organisasi atau satuan kerja. Dengan pendekatan seperti ini (bottom up) akan menstimulasi segenap komponen yang ada dalam satuan organisasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian visi yang akan disepakat.
- d. Rumusan visi yang berasal dari pimpinan (top Down) perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis, terbuka penyempurnaan dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawah.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas peranan dan fungsi kepala sekolah sangat diperlukan dalam mengelola sekolah. Peranan kepala sekolah ialah bentuk perilaku yang diharapkan pada setiap orang untuk menjalankan fungsinya. Fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer dituntut untuk mampu mengelola sekolah dengan baik dan mampu menyusun kurikulum sekolah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagi oleh Permendiknas No.13 Tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah menyatakan “salah satunya supervisi manajerial yaitu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional”.

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dapat diartikan pimpinan atau ketua dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, sedang kata sekolah adalah sebuah lembaga di mana terjadi tempat menerima dan memberi. Berdasarkan penggabungan dua kata tersebut dapat didefinisikan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin sebuah lembaga yang menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.

Wahjosumidjo (1994:83) mendefinisikan bahwa “kepala sekolah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”. Selanjutnya Permendiknas No.28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah menyatakan “Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dirumuskan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas sebagai pemimpin yang berperan sebagai manajer di lembaga dimana terjadi interaksi belajar mengajar.

Menurut Rochman Natawidjaja (1987) dalam (www.pengertianahli.com) bimbingan adalah “suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya”.

Selanjutnya Frank Parson. 1951 (dalam RM Fatihah <http://eko13.wordpress.com>) menyatakan “Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya”. Selanjutnya Chiskon 1959 (dalam RM Fatihah <http://eko13.wordpress.com>) menyatakan “Bimbingan membantu individu untuk lebih mengenai berbagai informasi tentang dirinya sendiri”.

Berikutnya Bernard dan Fullmer 1969 (dalam RM Fatihah <http://eko13.wordpress.com>) menyatakan “bahwa bimbingan dilakukan untuk meningkatkan perwujudan diri individu”. Dapat dipahami bahwa bimbingan membantu individu untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungannya. Menurut Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Bimbingan adalah “Petunjuk penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntutan”.

Dari beberapa pengertian bimbingan di atas, dapat ditarik kesimpulan bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Menurut kamus Bahasa Indonesia Modern “intensif” berarti dalam-dalam, kuat-kuat, sungguh-sungguh.

Berdasarkan pengertian bimbingan dan intensif dapat ditarik suatu kesimpulan bimbingan intensif adalah pemberian bantuan yang diberikan seorang ahli kepada seseorang atau individu secara dalam-dalam, kuat-kuat sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

MASALAH

Apakah melalui bimbingan intensif dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam perumusan visi sekolah ?

RENCANA PEMECAHAN MASALAH/TINDAKAN

peneliti mencoba untuk melihat proses peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam merumus visi sekolah, melalui penyiapan instrumen proses yang telah dirancang oleh peneliti guna untuk melihat apakah kepala sekolah dalam merumus visi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini nanti akan dibuktikan dengan melihat visi sekolah yang sudah dibuat oleh kepala sekolah bersama timnya.

TUJUAN

1. Untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam merumuskan visi sekolah.
2. Untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian **bagi peneliti** yaitu: (1) meningkatkan profesionalisme peneliti sebagai pengawas sekolah, (2) hasil penelitian ini digunakan sebagai evaluasi terhadap kepala sekolah dalam menyusun kurikulum sekolah khusus dokumen 1, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pembinaan oleh peneliti sebagai pengawas sekolah khususnya di sekolah binaan. **Bagi sekolah:** (1) sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan; (2) menjadi sekolah yang diperhitungkan oleh masyarakat. **Bagi guru:** (1) adanya pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas; (2) guru dapat mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien, **Bagi siswa:** (1) siswa lebih percaya diri dalam mengikuti proses belajar mengajar, sehingga tercapai target kompetensi dasarnya, (2) adanya keseriusan belajar, semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi terhadap materi yang diberikan oleh guru.

METODE PENELITIAN TINDAKAN

Setting penelitian ini meliputi: tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, waktu penelitian, siklus Penelitian yakni:

1. Tempat Penelitian, SMP N 10 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
2. Subyek dan Obyek Penelitian, Kepala sekolah SMPN 10 Sungai Kakap
3. Waktu Penelitian, dilaksanakan pada semester ganjil Januari sampai dengan Maret 2014 selama tiga bulan.

4. Penelitian Tindakan Sekolah dilaksanakan melalui dua siklus, untuk melihat peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun visi sekolah.
5. Sumber data dalam penelitian ini yakni: (1) kepala sekolah, (2) dokumen KTSP dan administrasi sekolah.
6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni: (1) observasi, dipergunakan untuk mengumpulkan data dan melihat kemampuan kepala sekolah dalam menyusun visi sekolah, (2) wawancara, dipergunakan untuk mendapat data atau informasi kemampuan kepala sekolah dalam menyusun visi sekolah dan (3) diskusi dilakukan antara peneliti dengan kepala sekolah.

Alat pengumpulan data PTS meliputi observasi, wawancara, dan diskusi. Observasi menggunakan lembar observasi untuk mengetahui komponen/aspek visi sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah. Wawancara menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki kepala sekolah dalam perumusan visi sekolah.

7. Prosedur penelitian

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Sekolah (*School Action Research*), yaitu sebuah penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan kepala sekolah untuk menciptakan suatu kinerja sekolah yang lebih baik. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk pendekatan deskriptif, guna untuk melihat peningkatan yang terjadi dari siklus ke siklus. Dengan metode ini peneliti berupaya menjelaskan data yang peneliti kumpulkan melalui komunikasi langsung atau wawancara, observasi, dan diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kepala sekolah dalam perumusan visi sekolah. Selanjutnya memberikan alternative/ usaha, guna meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam merumuskan visi sekolah. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam Penelitian Tindakan Sekolah, menurut Sudarsono, F.X, (1999:2) yakni: (1) Rencana : Tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan atau mengubah sebagai suatu bentuk solusi yaitu mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dalam suasana yang menyenangkan, melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang visi sekolah dengan menyiapkan lembar wawancara untuk kepala sekolah; (2) Pelaksanaan: Apa yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya memperbaiki peningkatan atau perubahan yang diinginkan yaitu dengan berkunjung/

observasi pada aspek –aspek yang diperlukan dan melihat visi yang dibuat oleh sekolah serta wawancara dengan guru; (3) Observasi: Peneliti melakukan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilaksanakan kepala sekolah dalam mencapai sasaran. Fungsi utama observasi adalah berusaha menangkap apa yang terjadi selama pertemuan dan wawancara berlangsung. Ide pokok adalah mencatat apa yang terjadi dalam pertemuan dan wawan cara. Rekaman dari pertemuan dan wawancara akan digunakan untuk analisis dan komentar kemudian; (4) Refleksi: Peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari rumusan visi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil dari refleksi ini, peneliti bersama kepala sekolah melaksanakan revisi atau perbaikan terhadap rencana awal yang mungkin saja bisa sesuai dengan apa yang peneliti inginkan.

Alur PTS dapat dilihat pada Gambar berikut :

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal sampai akhir. Penelitian ini merupakan proses pengkajian sistem berdaur sebagaimana kerangka berpikir yang dikembangkan oleh (Suharsimi Arikunto, dkk. 2006:74). Prosedur ini mencakup tahap-tahap: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat kegiatan tersebut saling terkait dan secara urut membentuk sebuah siklus. PTS merupakan

penelitian yang bersiklus. Artinya penelitian dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sampai tujuan penelitian dapat tercapai.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah tentang penyusunan visi sekolah, ternyata kepala sekolah belum pernah mengikuti pelatihan penyusunan visi sekolah, sehingga visi sekolah yang dibuat belum sepenuhnya mengacu pada tuntutan penyusunan visi sekolah.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 10 Sungai Kakap, yang merupakan sekolah binaan peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari visi sekolah yang dibuat, terjadi peningkatan dalam penyusunan visi sekolah. Pada awalnya visi sekolah yang dibuat “Beriman dan Bertaqwa, Berprestasi dan Berakhlak Mulia”. Visi sekolah yang dibuat sudah memasukan unsur sikap (K1, K2) dan pengetahuan (K3), namun unsur keterampilan (K4) belum dimasukan .

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan peneliti dari siklus satu ke siklus dua terjadi peningkatan perumusan visi awalnya perumusan visi berbunyi “ Beriman dan Bertaqwa, Berprestasi dan Berakhlak Mulia”. Selanjutnya perumusan visi setelah di beri bimbingan berbunyi: “Beriman dan Bertaqwa, Berprestasi, Terampil serta Berakhlak Mulia”. Visi yang dirumuskan sudah sesuai dengan tuntutan Permendikbud tahun 2014, yakni sudah memasukkann unsur sikap (K1, K2), pengetahuan (K3) dan keterampilan (K4).

Melalui bimbingan intensif ternyata kepala sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun visi sekolah. Adapun indikator keberhasilan yang dicapai dalam penelitian ini, dapat dilihat peningkatan penyusunan visi sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kepengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut : Dengan mengadakan bimbingan intensif dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam perumusan visi sekolah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan visi sekolah yang dibuatnya sebelum ada bimbingan visi sekolah sebagai berikut “ Beriman dan Bertaqwa, Berprestasi dan Berakhlak Mulia”. Setelah adanya bimbingan memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan perumusan visi sekolah dengan adanya penambahan kalimat terampil adalah sebagai berikut: “Beriman dan Bertaqwa, Berprestasi, Terampil serta Berakhlak Mulia”.

SARAN

1. Dalam perumusan visi sekolah harus didasarkan pada landasan yuridis dan tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.
2. pelaksanaan kegiatan di sekolah agar mengacu pada visi yang telah dibuat.
3. Visi sekolah agar dipasang pada tempat yang mudah dibaca oleh orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Karya Tulis Ilmiah*. Untuk Pengawas Sekolah Berupa Laporan
- BSNP. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta:BSNP
- [Http://eko13.wordpress.com/2008/05/04/pengertian-konseling](http://eko13.wordpress.com/2008/05/04/pengertian-konseling)
- Peraturan Pemerintah, No.19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Permendiknas RI No. 12 Tahun 2007a *Tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah*
- Permendiknas RI No. 19 Tahun 2007b *Tentang Standar Pengelolaan*
- Permendiknas RI No. 13 Tahun 2007c *Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah*
- Permendiknas RI No. 28 Tahun 2010 *Tentang Penugasan guru sebagai Kepala/Madrasah*. Jakarta: Mendiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2013 *Tentang Standar Kompetensi Lulusan*: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Standar isi*: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 66 Tahun 2013 *Tentang Standar Penilaian*: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 81a Tahun 2013 Tentang *Implementasi Kurikulum*: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan badan Pengembangan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pendidikan, *Implementasi Kurikulum 2013 untuk pengawas sekolah*: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- Suharjono. 2003. *Menyusun Usulan Penelitian*. Jakarta: Makalah Disajikan pada Kegiatan Pelatihan Tehnis Tenaga Fungsional Pengawas.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua
- Wahjosumidjo. 1994. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-bimbingan-menurut-para-ahli.html diakses tanggal 9 Oktober 2014
- UURI. 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Proyek Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional.